

KOTA LAYAK ANAK

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak.
3. Mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Untuk mempercepat implementasi KLA digunakan strategi “Pengarustamaan Hak Anak” yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

PERAN PARA PIHAK

1. Lembaga Legislatif.

DPRD Provinsi mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan KLA yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Lembaga Yudikatif

Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA.

3. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.

4. Dunia Usaha

Dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan antara lain yang bersumber dari alokasi Corporate Social Responsibility untuk mendukung pelaksanaan KLA.

5. Masyarakat

Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan untuk turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah dapat mengacu kepada indikator KLA, yang tertuang dalam dokumen Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.(Permen KPP-PA Nomor 12 Tahun 2011) terdiri dari penguatan kelembagaan 3 indikator, klaster hak anak (5 klaster) 24 indikator.

I. Kelembagaan

1. Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

Ukuran: Ada dan dilaksanakan

2. Terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Ukuran: - Ada Gugus Tugas KLA, dan berfungsi

- Ada Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA
- Ada data dan informasi Profil Anak teragregasi, dan diperbarui setiap tahun
- Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA), dan meningkat setiap tahun
- Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA), dan meningkat setiap tahun
- Persentase DEKELA yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/sejenisnya

3. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Ukuran: Ada, dan meningkat setiap tahun

II.KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

4. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran

Ukuran: - 100% Anak teregistrasi

- Persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun

5. Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Ukuran: - Jumlah fasilitas ILA meningkat setiap tahun, dapat diakses oleh semua anak, dan tanpa biaya

- Ada mekanisme pengawasan konten ILA

- Minimal 1 Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar
- Telepon Sahabat Anak (TeSA)/sejenisnya berfungsi

6. Terlembaganya Partisipasi Anak

Ukuran: - Ada Forum Anak Kabupaten/Kota, dan aktif

- Persentase Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan, dan meningkat setiap tahun
- Persentase Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor (2P), dan meningkat setiap tahun
- Persentase Forum Anak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dan meningkat setiap tahun

III.KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

7. Persentase Perkawinan Anak

Ukuran: - Di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun

8. Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Ukuran: - Ada, berfungsi, dan jumlah lembaga meningkat setiap tahun

9. Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi

Ukuran: - Meningkat setiap tahun

10. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak

Ukuran: - Ada Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), dimanfaatkan oleh semua anak, tidak berbayar, dan meningkat setiap tahun

- Presentase RBRA sesuai standar
- Ada Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS), dan meningkat setiap tahun
- Angka kecelakaan lalu-lintas pada anak menurun setiap tahun

- Aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas meningkat setiap tahun

IV.KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

11. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Ukuran: - Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun

- Angka Kematian Bayi, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun
- Angka Kematian Ibu Melahirkan, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun

12. Prevalensi Status Gizi Balita

Ukuran: - Prevalensi gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun

13. Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

Ukuran: - Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun

14. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Ukuran: - Meningkat setiap tahun

15. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi

Ukuran: - Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun

16. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok

Ukuran: - Semua fasilitas umum dan tempat di mana anak banyak berkumpul, bebas asap rokok

- Tidak ada iklan rokok, di tempat publik di mana anak banyak berkumpul

V. KLASSTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

17. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

Ukuran: - Meningkatkan setiap tahun

18. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun

Ukuran: - 100%

19. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)

Ukuran: - Meningkatkan setiap tahun untuk setiap jenjang pendidikan

- Minimal 4 SRA (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar

20. Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

Ukuran: - Ada, dapat diakses semua anak, tidak berbayar, dan meningkat setiap tahun

- Minimal 1 Pusat Kreativitas Anak (PKA)
- Kegiatan pengembangan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak meningkat setiap tahun

VI. KLASSTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

21.a Anak Korban Kekerasan yang terlayani

Ukuran: 100%

21.b Persentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA)

Ukuran: 100%

22.a Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani

Ukuran: 100%

22.b Anak korban bencana dan konflik yang terlayani

Ukuran: 100%

23. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani

Ukuran: 100%

24.a Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang Terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi

Ukuran: 100%

24.b Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme

Ukuran: 100%

24.c Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Ukuran: 100%

Upaya percepatan Kota Layak Anak dilaksanakan melalui Puskesmas Ramah anak dan Sekolah Ramah anak dan Forum Anak Daerah (FORDA). Pada Puskesmas Ramah Anak pelayanan yang diberikan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak.

Indikator Puskesmas Ramah Aak :

1. Tenaga kesehatan dilatih Konvensi Hak Anak
2. Tersedia pusat informasi Hak Anak
3. Ruang tunggu/ bermain anak yang aman
4. Pelayanan kesehatan anak di sekolah (UKS) integrasi PAUD Yandu dan BKB
5. Penyelenggaraan tata laksana kasus KTA (kekerasan terhadap anak)
6. Tersedia Ruang ASI dan dimanfaatkan
7. Ada tanda dan larangan merokok
8. Sanitasi lingkungan puskesmas sesuai dengan standar

Disamping Itu juga ada Forum Anak DaDaerah (FORDA) sebagai wujud hak pstisipasi anak. Forum anak daerah adalah wadah untuk menyalurkan dan mensosialisasikan hak-hak anak.

Kegiatan yang telah dilaksanakan FORDA adalah;

1. Kegiatan sosial yaitu berupa mengumpulkan dana untuk bencana alam
2. Sosialisasi PUHA (pengarusutamaan Hak Anak)
3. Terlibat kepanitiaan Perlombaan dalam rangka Hari Anak Nasional
4. Pelatihan pengembangan diri dari Psikolog
5. Membangkitkan lagi permainan anak tradisional

Keanggotaan, Tugas Pokok, Kedudukan GUGUS TUGAS KLA

No	Keanggotaan	Tugas Pokok	Kedudukan
1	Sekretaris Daerah	Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan KLA.	Penanggungjawab merangkap Ketua Gugus Tugas KLA
2	Kepala BAPPEDA	- Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak dari masing-masing SKPD. - Mengkoordinasikan program-program pembangunan anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan lembaga internasional. - Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak, termasuk pelibatan peran anak.	Penanggung Jawab Bidang Perencanaan dan Penganggaran
3	Kepala Badan Keuangan Daerah	Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap SKPD.	Wakil Ketua Gugus Tugas KLA
4	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan	Sekretaris Gugus Tugas KLA